

# **PENGARUH PROFESI AKUNTAN UNTUK PENGEMBANGAN LAPORAN KEUANGAN DESA DALAM PENERAPAN UU NO 6 TAHUN 2014**

Oleh:

Ulfah Daningrum, Lia ratnasari, Anton  
Email: [daningrumulfah95@gmail.com](mailto:daningrumulfah95@gmail.com)  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala

## **ABSTRACT**

*Under Law No. 6 of 2014 which states that the village will receive funding of 1.4 Billion for rural development. Where the funds will be paid out in stages that began the first stage in April 2015. So by the constraints of the current government has not issued regulations governing the financial processing village government also states to immediately implement the process of preparation of financial statements in the village using generally accepted accounting standards, For that, is necessary to enter the village accountant for the success of the program of the government. Whereas in reality, many accounting scholars today who does not have the necessary skills to education majors. So, should the formal education system that is associated with this department more matured more. Thus, it can help to better understand the bureaucracy village again on the financial statements. But, in fact, many villagers are still not open to the arrangement report for village development standards.*

**Keywords:** *government regulation, graduate accountant, professional accountant, financial statements*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Di tahun 2015 ini, Indonesia sudah mulai mengenal adanya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang masuk ke Indonesia yang semakin bersaing dengan pangsa pasar internasional di Asia. Maka Indonesia perlu meningkatkan fundamental birokrasi yang baik, mulai dari yang paling awal yaitu birokrasi desa yang masih perlu adanya pengembangan dan perbaikan. Banyak sekarang bank asing yang mulai masuk dan mencari pangsa pasar di Indonesia dan membangun *branch* di pelosok desa yang masih belum disentuh oleh bank lokal sendiri. Seperti bank besar di Indonesia, BCA, Mandiri, BTN, BNI, dll. Satu bank lokal yang sudah mulai menyentuh desa yaitu BRI hampir menyeluruh. Mari kita lihat, beberapa bank asing yang sudah mencoba untuk menyentuh desa di Indonesia adalah rabobank, citi bank, dll.

Seperti yang dilansir dari Kompas, menyebutkan bahwa dikeluarkan UU desa untuk desa seluruh Indonesia yaitu UU No. 6 thn 2014 dimana setiap desa mendapatkan dana segar sebesar Rp 1,4 Milyar. Dana tersebut akan disalurkan secara bertahap, dan tahap pertama penyalurannya telah dilaksanakan, yaitu pada bulan April 2015 kemarin. Sedangkan yang masih menjadi kendala hingga kini yaitu pemerintah belum mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur pengelolaan keuangan desa. Padahal dana tersebut akan diaudit langsung oleh BPK, jika tidak hati-hati dana desa justru menjadi bumerang yang mengirim banyak aparat desa masuk bui. Sedangkan di desa masih minimnya

pengetahuan akuntansi yang menyulitkan penyusunan pelaporan keuangan desa. Selama ini pelaporan keuangan di desa hanya memakai system *single entry*, sedangkan akuntansi modern mengenal sistem yang namanya *double entry* atau debit dan kredit.

Untuk mempercepat implementasi pelaporan keuangan desa bisa dengan mengirim para sarjana akuntansi masuk desa atau menggandeng Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai mentor. Yang menjadi pertanyaan para sarjana akuntansi masih banyak yang belum paham dengan standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) apalagi aparat desa yang tidak pernah bersentuhan dengan akuntansi, maka kita butuh adanya akuntan yang memiliki kemampuan dengan pendidikan akuntan yang baik untuk mengolah keuangan yang ada di desa. Sedangkan pada kenyataannya masih banyak sarjana akuntan yang masih belum mampu dan belum mengerti tentang pendidikan.

Pada kenyataannya masih banyak lulusan jurusan akuntansi yang belum memiliki wawasan tentang pendidikan akuntansi itu sendiri. Banyak terjadi sarjana akuntansi yang bekerja diluar bidangnya. Seharusnya sarjana ekonomi memiliki tiga langkah yang dapat ditempuh. Yang pertama adalah menyelesaikan pendidikan ekonomi jurusan akuntansi, dan mampu langsung bekerja. Kedua, melanjutkan jenjang pendidikan ekonomi dari strata-1 ke strata-2, untuk lebih mematangkan pengetahuannya tentang jurusan akuntansi. Ketiga, melanjutkan pendidikan profesi untuk menjadi akuntan public. Sarjana akuntansi yang telah menyelesaikan pendidikan jenjang program sarjana jurusan akuntansi, maka sarjana akuntansi dapat memilih profesi sebagai akuntan publik atau non akuntan publik (Astami 2002). Tetapi untuk faktanya banyak sarjana ekonomi lulusan strata-1 tidak melanjutkan kembali ke jenjang berikutnya. Hal ini yang menyebabkan minimalisasinya wawasan mengenai akuntansi. Sehingga munculah sarjana ekonomi yang tidak berkompeten.

Padahal pemerintah membutuhkan profesi akuntansi untuk mengolah keuangan baik Negara maupun masuk ke desa-desa. Supaya menyongsong lebih tertata lagi laporan keuangan yang lebih berterima umum yang sesuai standar yang terdapat di peraturan menteri dalam negeri no 37 tahun 2007.

### **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemikiran di atas maka perumusan masalah adalah :  
Pentingnya akuntan masuk desa ketika kondisi birokrasi desa untuk menghadapi MEA 2015 yang minimnya pengetahuan akuntan oleh profesi akuntan.

### **Tujuan**

Berdasarkan dari perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan karya ilmiah adalah :  
Untuk mengetahui pentingnya pengolahan laporan keuangan untuk desa, meningkatkan kemampuan sarjana akuntan yang semakin handal.

### **Manfaat**

Berdasarkan dalam penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat :

1. Memahami tentang profesi akuntan
2. Memberikan pemahaman kepada birokrasi desa tentang pentingnya akuntan masuk desa

### **Landasan Teori**

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) adalah pendidikan tambahan pada pendidikan tinggi setelah program sarjana Ilmu Ekonomi dalam program studi akuntansi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor

179/U/2001 tanggal 21 November 2001 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi. Sedangkan yang dimaksud dengan profesi akuntan menurut International Federation of Accountants (Regar 2003) adalah semua bidang pekerjaan yang menggunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan public, akuntan intern yang bekerja pada perusahaan industri, keuangan atau dagang, akuntan yang bekerja di pemerintahan, dan sebagai akuntan pendidik. (Olson 1979) di dalam Journal Accountant nya mengemukakan empat perkembangan yang harus diperhatikan oleh profesi akuntan yaitu :

1. Makin banyaknya jenis dan jumlah informasi yang tersedia bagi masyarakat
2. Makin baiknya transportasi dan komunikasi
3. Makin disadarinya kebutuhan akan kualitas hidup yang lebih baik
4. Tumbuhnya perusahaan-perusahaan multinasional sebagai akibat dari fenomena pertama dan kedua

Pendapat Olson ini, profesi akuntan diharapkan dapat mengantisipasi keadaan untuk pengembangan profesi akuntan di masa yang akan datang. Pada umumnya ada beberapa golongan profesi akuntansi :

1. Akuntan Publik (*Public Accountants*)

Akuntan publik atau akuntan internal dan juga dikenal dengan auditor adalah akuntan independen yang memberikan jasanya dalam membantu perusahaan dalam hal memeriksa laporan keuangan, pemeriksaan dalam jasa perpajakan, dan konsultasi di bidang keuangan maupun jasa konsultasi manajemen serta jasa penyusunan system manajemen.( Jumamik 2007) menyatakan bahwa akuntan public adalah akuntan yang bergerak dalam bidang akuntansi public, yaitu menyerahkan berbagai macam jasa akuntansi untuk perusahaan-perusahaan bisnis. Mereka bekerja dengan bebas sesuai dengan keinginan mereka sendiri dan selalu berhubungan dengan klien pada umumnya mereka mendirikan suatu kantor akuntan. Akuntan yang bekerja dalam Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan salah satu dalam kategori akuntan publik. Seseorang yang berpraktek sebagai akuntan public dan mendirikan KAP haruslah terlebih dahulu mendapatkan izin dari Departemen Keuangan. (Baridwan 1998) dalam bukunya mengatakan bahwa akuntan publik merupakan satu-satunya profesi yang bisa memberikan opini atas laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajemen perusahaan.

2. Akuntan Perusahaan (*Intern Accountant*)

Akuntan perusahaan atau akuntan intern dan ada juga yang menyebutkan akuntan manajemen adalah akuntan yang bekerja di dalam suatu perusahaan atau organisasi (perusahaan milik negara maupun milik swasta). Akuntan perusahaan sendiri dapat dijabat oleh hampir semua lapisan, mulai dari bagian staf hingga direktur keuangan. (Triroria 2004) mengatakan bahwa tugas pokok dari akuntan perusahaan adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai organisasi.

3. Akuntan Pemerintah (*Government Accountant*)

Akuntan Pemerintah adalah akuntan profesional yang bekerja pada lembaga pemerintahan dan bertugas untuk melaksanakan pemeriksaan atas pertanggung jawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Sedangkan menurut (Jumamik 2007) akuntan pemerintahan adalah akuntan yang bekerja pada instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban keuangan yang ditunjuk oleh unit-unit organisasi dalam pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditunjuk kepada pemerintah. Dua tugas utama dari akuntan pemerintah adalah melakukan

pemeriksaan serta pengawasan atas aliran keuangan instansi Negara dan merancang system akuntansi untuk instansi pemerintah. Departemen Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan instansi pajak adalah lembaga pemerintah yang bertanggungjawab kepada Presiden bukan akuntan pemerintah.

#### 4. Akuntan Pendidik

Akuntan pendidik adalah seorang akuntan yang bertugas dalam bidang pendidikan dalam hal ini penyampaian tentang akuntansi baik dalam melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, pengajaran serta dalam hal penyusunan kurikulum pendidikan. Merurut (Rahayu et al 2003) mengatakan bahwa mahasiswa yang mengharapkan bekerja sebagai akuntan pendidik lebih mempunyai jaminan hari tua. Hal ini juga menjelaskan bahwa akan membuat orang semakin tertarik untuk lebih memilih profesi sebagai akuntan pendidik. Akuntan pendidik sendiri dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkarir pada tiga bidang akuntan lainnya. Perekonomian yang semakin modern dan berkembang, pastinya akan semakin membutuhkan jasa seorang akuntan. Sehingga, disinilah kegunaan dari seorang akuntan pendidik yaitu sebagai tenaga yang menciptakan seorang akuntan yang handal nantinya.

Profesional adalah istilah bagi seseorang yang menawarkan jasa atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalannya dan menerima gaji sebagai upah atas jasanya. Profesional akuntansi adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan intern yang bekerja pada perusahaan industri, keuangan atau dagang, akuntan yang bekerja di pemerintah, dan akuntan sebagai pendidik. Dalam arti sempit, profesi akuntan adalah lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan sebagai akuntan publik yang lazimnya terdiri dari pekerjaan audit, akuntansi, pajak dan konsultan manajemen. Standar Kompetensi Lulusan Sarjana Akuntansi Di sektor akuntansi, Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia, Tarko Sunaryo, mengakui ada kekhawatiran karena banyak pekerja muda yang belum menyadari adanya kompetisi yang semakin ketat. Selain kemampuan Bahasa Inggris yang kurang, kesiapan mereka juga sangat tergantung pada mental. Banyak yang belum siap kalau mereka bersaing dengan akuntan luar negeri. Untuk itu perlu ditetapkan standar kompetensi lulusan sarjana akuntansi sebagai berikut:

##### 1. Kompetensi Utama:

- a. Mampu menyusun laporan keuangan perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur sesuai dengan standar akuntansi
- b. Mampu menganalisis informasi keuangan untuk kebutuhan internal perusahaan
- c. Mampu mendesain sistem akuntansi manual dan berbasis teknologi informasi
- d. Mampu mendesain Kertas Kerja Audit dan melakukan pengauditan laporan keuangan
- e. Mampu menyusun dan menganalisis laporan keuangan sektor publik
- f. Mampu menghitung, melaporkan, dan menyetorkan pajak sesuai peraturan perpajakan
- g. Mampu melakukan riset/menulis karya ilmiah

##### 2. Kompetensi Pendukung

- a. Mampu belajar secara mandiri dan berkelanjutan (*longlife learner*)
- b. Mampu menganalisis studi kasus akuntansi dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif
- c. Mampu menyampaikan pendapat secara jelas baik secara lisan maupun tulisan serta menghargai pendapat orang lain (*communication skills*)
- d. Mampu bekerja dalam tim untuk menyelesaikan kasus (*working in team skills*)

- e. Kreatif dan inovatif dalam memberikan solusi terhadap studi kasus (*problem solving and creative skills*)
  - f. Terampil dalam mengaplikasi berbagai teknologi dalam penyelesaian masalah akuntansi pada berbagai entitas
  - g. Menghayati dan mengamalkan tujuan hidup untuk kesejahteraan bersama yang berlandaskan pada nilai-nilai kehidupan (*ethical skill*)
3. Kompetensi Lainnya:
- a. Mampu berbahasa Indonesia dan Inggris dengan baik dan benar
  - b. Berkemampuan mengendalikan diri, memiliki integritas dan disiplin tinggi
  - c. Beriman, berakhlak mulia dan cinta tanah air
  - d. Memahami estetika, etika sosial dan akademik
  - e. Adaptif dan cepat tanggap/peduli terhadap lingkungan
  - f. Mampu membangun jejaring dan kerjasama di bidang akuntansi;

Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undang di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan peraturan pemerintah adalah materi untuk menjalankan undang-undang. Peraturan pemerintah tentang pedoman pengolahan laporan keuangan desa yang dinyatakan pada peraturan menteri dalam negeri UU no 37 tahun 2007.

Undang-undang desa adalah UU no 6 tahun 2014 terdiri dari 122 pasal yang mengatur tentang desa. Dimana salah satunya berisi tentang pemberian dana desa sebesar 1,4 Milyar dari pemerintah untuk pengembangan desa.

Laporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis dari bawahan kepada atasan sesuai dengan hubungan wewenang dan tanggung jawab yang ada antara mereka. Salah satu cara pelaksanaan komunikasi dari pihak yang satu kepada pihak yang lainnya.

Laporan keuangan adalah suatu laporan yang berisikan informasi seputar keuangan dari sebuah organisasi. Laporan keuangan di buat atau diterbitkan oleh perusahaan dari hasil proses akuntansi agar bisa menginformasikan keuangan dengan pihak dalam maupun pihak luar yang terkait. Pengertian laporan keuangan menurut Soemarsono adalah laporan yang dibuat untuk para pembuat keputusan, terutamanya adalah pihak di luar organisasi atau perusahaan, yang isinya posisi keuangan dan hasil dari usaha suatu perusahaan. Seperti yang kami kutip dari wikipedia, pengertian laporan keuangan adalah sebuah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada periode tertentu yang bisa digunakan sebagai penggambaran kinerja dari perusahaan tersebut.

Pembukuan Tunggal (*Single Entry*), sistem pencatatan *single entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat secara tunggal (tidak berpasangan). Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi Penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi Pengeluaran. Pada praktek yang berjalan di Pemerintah Daerah selama hampir 3 dekade, pencatatan ini dipraktekkan contohnya dalam Buku Kas Umum (BKU). Pencatatan semacam itu disebut juga pembukuan. Sistem tata buku tersebut merupakan sebagian kecil dari akuntansi. Sistem ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu sederhana dan mudah dipahami. Akan tetapi, sistem ini juga memiliki kelemahan, antara lain kurang lengkap untuk pelaporan karena hanya dapat melaporkan saldo kas, dan tidak dapat melaporkan utang, piutang dan ekuitas dana. Juga sulit untuk melakukan kontrol transaksi, akibatnya sulit menelusuri kesalahan pembukuan yang terjadi. Oleh karena itu, dalam akuntansi terdapat sistem pencatatan yang lebih baik dan dapat mengatasi kelemahan di atas. Sistem ini disebut sistem *double entry*. Sistem pencatatan *double entry* inilah yang sering disebut akuntansi.

Pembukuan Berpasangan (*Double Entry*), sistem pencatatan *double entry* juga sering disebut sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi akan dicatat secara berpasangan (*double* = berpasangan, *entry* = pencatatan). Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut ada sisi Debet dan Kredit. Sisi Debet ada di sebelah kiri, sedangkan sisi Kredit ada di sebelah kanan. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi, yaitu aset = kewajiban + ekuitas dana.

Akuntansi adalah suatu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem-subsistem atau kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain dan memiliki tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah *input* (masukan) menjadi *output* (keluaran). Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. *Output*-nya adalah laporan keuangan. Di dalam proses akuntansi, terdapat beberapa catatan yang dibuat. Catatan-catatan tersebut adalah jurnal, buku besar, dan buku pembantu.

Undang-undang desa adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Sehingga, dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Undang-undang ini juga mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan usaha Milik desa, Kerjasama Desa, lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan pengawasan. Selain itu, Undang-undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat sebagaimana diatur dalam Bab XIII.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif analitik, yang akan menggambarkan serta menganalisis pentingnya akuntan masuk desa.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data sekunder yang diperoleh dari literatur, buku, jurnal, laporan resmi dan informasi dari jaringan internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan mencari dan mengumpulkan data-data sekunder yang bersumber dari buku, surat kabar, data online dan referensi lainnya yang tingkat validitasnya terhadap permasalahan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan menggunakan metode *content analysis*, yaitu dengan menjelaskan dan menganalisis dari sumber-sumber yang ada, dengan catatan data-data tersebut saling berhubungan satu sama lain dengan permasalahan yang diteliti.

## **PEMBAHASAN**

### **Kondisi Indonesia Saat Ini**

Era globalisasi saat ini menyediakan berbagai hal yang memudahkan kita semua. Sehingga, seluruh negara anggota ASEAN sepakat untuk segera mewujudkan integrasi ekonomi yang lebih nyata yaitu melalui MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN dimana MEA merupakan suatu konsep yang memungkinkan seluruh negara yang termasuk dalam ASEAN untuk mengirim segala jenis produk maupun tenaga kerja serta jasa ke negara

yang diinginkan, dengan kata lain persaingan bebas secara terbuka dan besar-besaran akan segera dimulai. 1 Januari 2016 telah ditetapkan Presiden Jokowi sebagai awal dimulainya pasar bebas ini. Indonesia sebagai salah satu Negara ASEAN haruslah mempersiapkan Sumber Daya Manusianya (SDM) agar terampil, cerdas dan kompetitif agar mampu bersaing dengan negara-negara lain yang lebih mampu dan lebih siap bersaing baik dilihat dari segi aspek apapun. Strategi-strategi yang bisa dipakai agar mampu bersaing di pasar bebas ini misalnya lebih meningkatkan pemeriksaan ekspor-impor, perlu adanya stabilitas politik, birokrasi atau pemerintahan yang bersih, dan adanya infrastruktur yang memadai. Namun, untuk dapat mencapai semua ini, dibutuhkan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang-bidang tertentu, meningkatkan pendidikan, dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan sebaik-baiknya sehingga meningkatkan pengelolaan produksi bahan baku agar masyarakat Indonesia memiliki standar ekonomi yang memadai. MEA sendiri dapat terwujud jika seluruh negara ASEAN harus melakukan perdagangan baik berupa barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil secara bebas dan arus modal yang lebih bebas. Adanya MEA diharapkan dapat membawa kawasan ASEAN menjadi kawasan yang makmur dan kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang merata, serta menurunkan tingkat kemiskinan serta perbedaan sosial-ekonomi di kawasan ASEAN.

Munculnya MEA juga memunculkan bank-bank asing ke Indonesia. Tak tanggung-tanggung, mereka berani untuk menysasar pada kalangan menengah ke bawah terutama masyarakat pedesaan yang kurang tersentuh oleh bank-bank dalam negeri kita. Bank-bank besar di negeri kita lebih tertarik untuk menysasar kalangan menengah ke atas. Karena dianggap nasabah yang potensial sehingga menjadi kewajiban untuk mendahulukannya. Contohnya saja BCA dan Mandiri, mereka lebih tertarik untuk menysasar kalangan atas ini. Bank BRI saja yang sepertinya masih memihak pada semua kalangan termasuk di dalamnya masyarakat pedesaan atau masyarakat menengah ke bawah. Ini bisa dibuktikan dengan kehadiran bank BRI di setiap pelosok desa.

### **Kondisi Sarjana Ekonomi**

Sarjana yang menjadi pengangguran sepertinya sudah menjadi rahasia umum pada saat sekarang ini. Lulusan S-1 Ekonomi pun menjamur. Karena, orang berpikiran bahwa pada saat sekarang ini, lulusan dari fakultas ekonomi sangat menjanjikan dalam hal mencari pekerjaan. Pilihan jurusan pun sering tertuju pada akuntansi karena dianggap memberikan pengharapan yang lebih. Lalu, bagaimana hasil (output) dari lulusan sarjana ekonomi khususnya akuntansi? Karena begitu banyaknya lulusan akuntansi pada saat sekarang ini, seharusnya perusahaan dengan mudah bisa mendapatkan seorang karyawan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tetapi, sepertinya tidak semudah yang dibayangkan oleh kita. Karena, banyak sekarang ini lulusan sarjana akuntansi tetapi jika ditanya tentang laporan atau dalam membuat laporan keuangan sederhana tetapi tidak paham dan tidak bisa. Ini tentunya sangat memalukan bukan?

Beberapa alasan yang menyebabkan S-1 menganggur adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Lambat
2. Kemampuan yang Melebihi Batas
3. Terlalu Banyak Sarjana Ekonomi
4. Banyak Sarjana yang Tidak Kompeten
5. Terlalu Monoton

Dengan adanya permasalahan tersebut, ini seharusnya dapat direspon oleh sistem pendidikan akuntansi supaya dapat menghasilkan sarjana akuntansi yang berkualitas dan siap untuk bersaing di dunia kerja yang keras. Dengan demikian, seharusnya sistem pendidikan merancang pendidikannya harus relevan dan sesuai dengan dunia kerja saat ini,

tidak melulu hanya teori saja. Sarjana akuntansi sendiri memiliki paling tidak ada tiga pilihan alternatif yang dapat dijadikan acuan. Setelah menyelesaikan program S-1 nya, sarjana akuntansi dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi seperti S-2. Atau alternatif berikutnya yaitu langsung bekerja. Bagaimana dengan alternatif yang ketiga? Melanjutkan pendidikan profesi menjadi salah satu alternatif pilihan yang menjanjikan. Setelah menyelesaikan pendidikannya di program sarjana jurusan akuntansi, menjadi akuntan publik maupun non akuntan publik bisa memberikan solusi lain dari kedua pilihan sebelumnya.

### **Pentingnya Profesi Akuntan Masuk ke Desa**

Kutipan diatas yang menyebutkan bagaimana kondisi Indonesia dan keadaan lulusan sarjana akuntansi yang saat ini sedang terjadi di Indonesia. Pernyataan di atas sebelumnya, dilihat dari perekonomian kita yang semakin berkembang pesat, dibutuhkan adanya tenaga akuntan, baik akuntan publik, akuntan perusahaan, akuntan pemerintah, ataupun akuntan pendidik. Akuntan pendidik sendiri disini mempunyai fungsi yang sangat signifikan, karena sebagai dasar atau landasan bagi para lulusan akuntan nantinya, bisakah mereka menjadi tenaga akuntan yang professional, berkualitas, dan menjunjung tinggi kode etik profesinya. Selain itu, disebutkan juga bahwa birokrasi desa di Indonesia tidak dapat menempuh untuk berjuang ke pasar perdagangan internasional.

Sehingga kita butuhkan pengelolaan yang baik dan benar dalam membangun keuangan desa dan disinilah nantinya profesi akuntan akan sangat berperan. Banyak kita lihat artikel tentang pengelolaan keuangan anggaran desa, laporan keuangan desa., dan penggunaan data modern masuk ke desa. Tetapi hal itu belum dapat berjalan dengan baik karena kurangnya pengetahuan dan keahlian mengenai keuangan. Padahal, kita tahu bila pemeriksaan keuangan akan diaudit langsung oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan jika desa saja belum mengenal betul tentang bagaimana penyusunan laporan keuangan yang seharusnya, maka bisa saja terjadi kesalah pahaman antara pihak BPK dengan pihak desa serta bisa menjadi bumerang bagi pihak desa nantinya. Laporan keuangan desa padahal seharusnya sudah disusun berdasarkan atau berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku umum.

Namun, kenyataannya laporan keuangan yang disusun oleh pihak desa masih menggunakan sitem *single entry* yang seharusnya sudah menggunakan system *double entry* yang sesuai dengan penyusunan laporan keuangan dalam akuntansi modern. Program akuntan masuk desa ini seharusnya sudah harus segera untuk dilaksanakan, karena mengingat program pemerintah untuk pengembangan desa yaitu penggelontoran dana sebesar Rp 1,4 M yang sesuai dengan amanat dari UU No.6 tahun 2014, dimana dana ini akan disalurkan kepada desa secara bertahap dan tahap pertama sudah terlaksana pada April 2015. Oleh karena hal itu, maka kita harus mengembangkan profesi akuntan yang ada di perguruan tinggi sehingga mampu membangun bersama desa.

NO	TANGGAL	DESKRIPSI	DEBIT	KREDIT	SALDO	
					Debit	Kredit
1	01/01	Saldo awal			10.000	
2	01/03	Pendapatan usaha	3000		13.000	
3	01/04	Pembayaran hutang usaha		2.000	11.000	
4	01/05	Biaya Listrik		500	10.500	
5	01/06	Piutang usaha	4.000		14.500	

6	01/07	Pembelian motor	5.000		19.500	
					19.500	

Laporan keuangan *double entry*

Sumber: <http://www.hartaku.com/bagaimana-mencatat-transaksi-keuangan-2/>

Contoh laporan keuangan di desa (*single entry*)

<b>ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA DESA</b> <b>DESA ..... KECAMATAN .....</b> <b>TAHUN ANGGARAN 2013</b>						
KODE REKENING	URAIAN		TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN		
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DESA</b>					
<b>1.1</b>		Pendapatan Asli Desa	111,000,000	127,250,000		
<b>1.1.1</b>		Hasil Usaha Desa	6,000,000	6,000,000		
<b>1.1.1.1</b>		Badan Usaha Milik Desa	6,000,000	6,000,000		
<b>1.1.1.2</b>		Badan Kredit Desa				
<b>1.1.2</b>		Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	30,000,000	30,000,000		
<b>1.1.2.1</b>		Tanah Kas Desa / Tanah Bengkok	12,000,000	12,000,000		
<b>1.1.2.2</b>		Pasar Desa	18,000,000	18,000,000		
<b>1.1.2.3</b>		Pasar Hewan				
<b>1.1.2.4</b>		Tambatan Perahu				
<b>1.1.2.5</b>		Bangunan desa				
<b>1.1.2.6</b>		Pelelangan ikan yang dikelola desa				
<b>1.1.2.7</b>		Lain-lain kekayaan milik desa				
<b>1.1.3</b>		Hasil Swadaya dan Partisipasi	75,000,000	90,000,000		
<b>1.1.3.1</b>		Swadaya dan Partisipasi Masyarakat	75,000,000	90,000,000		
<b>1.1.4</b>		Hasil Gotong Royong	-	-		
<b>1.1.4.1</b>		Hasil Gotong Royong Masyarakat				

<b>1.1.5</b>			Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	-	1,250,000
<b>1.1.5.1</b>			Jasa Giro		1,250,000
<b>1.2</b>		Bagi Hasil Pajak		-	20,000,000
<b>1.2.1</b>			Bagi Hasil Pajak Kabupaten	-	-
<b>1.2.1.1</b>			Bagi Hasil Pajak Kabupaten		
<b>1.2.2</b>			Bagi Hasil PBB	-	20,000,000
<b>1.2.2.1</b>			Bagi Hasil PBB		20,000,000
<b>1.3</b>		Bagi Hasil Retribusi		-	-
<b>1.3.1</b>			Bagi Hasil Retribusi Daerah	-	-
<b>1.3.1.1</b>			Bagi Hasil Retribusi Daerah		
<b>1.4</b>		Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah		80,000,000	100,000,000
<b>1.4.1</b>			Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	80,000,000	100,000,000
<b>1.4.1.1</b>			Alokasi Dana Desa	80,000,000	100,000,000
		PEMBIA YAAN NETTO			

Sumber : <http://desacangan2012.blogspot.co.id/2014/11/simulasi-laporan-keuangan-desa.html>

## Solusi

Melihat permasalahan dan kenyataan yang terjadi, banyak cara yang dapat diterapkan untuk mendukung program pemerintah tentang pengembangan desa yang terdapat dalam UU No.6 tahun 2015. Dalam hal ini kita perlu memperkenalkan pentingnya akuntan untuk masuk ke desa, tetapi masih banyak warga desa belum mengerti dan paham tentang pentingnya pengelolaan keuangan di desa. Untuk itu kita perlu memperkenalkan perlunya seorang akuntan masuk ke desa, kemudian mengadakan pengembangan SDM desa untuk memahami tentang akuntansi, kemudian di dalam pengembangan di perguruan tinggi perlu adanya tindakan yang lebih ketat untuk mengantarkan ilmu akuntan ke mahasiswanya. Sehingga para lulusan sarjana benar-benar mengerti dan paham tentang jurusan yang diambilnya. Pemerintah juga sudah menerapkan pedoman mengenai pengolahan laporan keuangan desa dalam UU no 37 no 2007. Dengan menerapkan laporan keuangan desa menggunakan *double entry* yang lebih rinci adanya debit dan kredit. Sebelumnya di beberapa desa dari jumlah kumulatif 78000 desa di Indonesia masih menggunakan *single entry* karena terbatasnya alat komunikasi, data selular, dan sumber daya yang terbatas.

Untuk memperkenalkan program ini ke desa maka kita perlu survei tempat dan lapangan pasar. Bagaimana *mind set* para warga desa sekitar, bagaimana penerapan laporan keuangan yang tepat dalam desa, kemudian menyaring sarjana yang tepat dan mampu untuk membantu pemerintahan di desa dalam pengolahan keuangan dan pembuatan laporan keuangan yang lebih tertata. Dengan adanya akuntan masuk ke desa dapat mengolah dana yang akan di salurkan ke desa untuk penganggaran dana birokrasi desa. Hal ini dapat digunakan untuk mencegah kemungkinana terjadinya korupsi dana daerah jika menampung dan menyaring para profesi akuntan yang jujur.

Untuk mempercepat pengimplementasian program akuntan masuk desa ini, kita bisa mengirim para lulusan sarjana akuntansi untuk membantu percepatan program ini. Selain itu, kita juga bisa mengajak IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) untuk ikut berperan serta sebagai pengawas dan mentor dalam penyuksesan program ini. Untuk mendukung program tersebut, kita bisa melakukan *training on job* kepada bendahara yang ada di desa, sehingga dapat mengefisiensi waktu dan biaya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah dielaborasi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa sarjana akuntansi sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah dalam mengolah laporan keuangan baik di pusat maupun di desa. Untuk memanfaatkan lulusan akuntansi yang terlalu banyak dalam pasar tenaga kerja. Apalagi dengan adanya MEA 2015, pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin melemah. Profesi akuntan adalah seseorang yang memiliki kemampuan tentang akuntansi melalui pendidikan formal tertentu yang diakui. Sedangkan fakta saat ini menyatakan bahwa banyak profesi akuntan yang belum memahami jurusannya tersebut, hal ini akan menghambat proses pengolahan data keuangan Negara. Apalagi Negara kita mengalami MEA 2015 sehingga perlu adanya akuntan yang mampu untuk mengolah data keuangan daerah. Sedangkan kondisi desa dinegara kita sekarang masih minim adanya pengetahuan untuk mengolah keuangan desa.

Untuk itu, perlu adanya sosialisasi terhadap perubahan *mind set* orang di desa dalam mengembangkan laporan keuangan desa. Mengirim para sarjana akuntan yang handal ke desa. Selain itu, kita juga bisa mengajak IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) untuk ikut berperan serta sebagai pengawas dan mentor dalam penyuksesan program ini. Untuk

mendukung program tersebut, kita bisa melakukan *training on job* kepada bendahara yang ada di desa, sehingga dapat mengefisiensi waktu dan biaya.

Maka pentingnya profesi akuntan masuk desa untuk membantu birokrasi desa dalam penyusunan dan pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi berterima umum. Namun, disini diperlukan adanya perbaikan dalam sistem pendidikan supaya dapat menghasilkan seorang akuntan yang profesional dan handal.

## DAFTAR PUSTAKA

- [http://www.kompasiana.com/islamrasional79.blogspot.com/akuntan-masuk-desa-selangkah-lagi\\_55291478f17e6161368b4579](http://www.kompasiana.com/islamrasional79.blogspot.com/akuntan-masuk-desa-selangkah-lagi_55291478f17e6161368b4579) (diakses tanggal 15 Oktober 2015)
- <http://jaimforever.blogspot.co.id/> (diakses tanggal 15 Oktober 2015)
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan\\_Profesi\\_Akuntansi](https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_Profesi_Akuntansi) (diakses tanggal 16 Oktober 2015)
- <http://nichonotes.blogspot.co.id/2014/11/profesi-akuntan-pemerintah.html> (diakses tanggal 16 Oktober 2015)
- Kartika, dian.2011.*Jurnal asset:Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karir akuntan public dan Non Akuntan Publik*.Vol 13.Hlm 9-19.
- <http://strategimanajemen.net/2015/05/25/alasan-kunci-kenapa-ratusan-ribu-lulusan-sarjana-s1-menganggur/> (diakses pada tanggal 18 Oktober 2015)
- [http://www.academia.edu/8105770/Profesi\\_Akuntansi](http://www.academia.edu/8105770/Profesi_Akuntansi) (diakses pada tanggal 20 Oktober 2015)
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan> (diakses pada tanggal 20 Oktober 2015)
- <http://laportadoradesuenos.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-laporan-keuangan-menurut.html> (diakses pada tanggal 21 Oktober 2015)
- <http://belajartanpabuku.co.id/2013/04/penyusunan-laporan-keuangan-akuntansi.html> (diakses pada tanggal 21 Oktober 2015)
- <http://www.hartaku.com/bagaimana-mencatat-transaksi-keuangan-2/> (diakses pada tanggal 21 Oktober 2015)